

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUGAR TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI GARAM DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON

Oleh: Erna¹, Ria Adriyani²

Abstrak

Pemerintah Indonesia mencanangkan Kebijakan berupa Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bertujuan memberdayakan petani garam untuk kesejahteraan dengan mengoptimalkan produksi garam dari sisi kualitas maupun kuantitas di tingkat lokal dan nasional. Masuknya garam import yang berkualitas lebih baik menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir pantai yang menggantungkan hidup dari produksi garam.

Sebagai upaya menanggulangi dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai maka menjadi penting untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan petani garam program PUGAR di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Cirebon yang dikaji melalui Implementasi pada model Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi kebijakan (*contents of Policy*) dan pelaksanaan kebijakan (*contexts of policy*).

PUGAR merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petani garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Isi Kebijakan (*contents of Policy*) PUGAR yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh petani garam pesisir Kab Cirebon.

Pada Pelaksanaan kebijakan (*Context of Policy*) PUGAR, yang telah dilakukan oleh kelompok di lokasi lahan tambak garam wilayah pesisir pantai Kabupaten Cirebon ternyata produk garam yang dihasilkan Program PUGAR belum dapat mensejahterakan masyarakat disebabkan belum meratanya program PUGAR diterima oleh petani garam sehingga garam yang diproduksi belum memenuhi standar yang ditetapkan industri. Hasil penelitian Dampak Kebijakan Program PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai kabupaten Cirebon dengan metode penelitian deskriptif analisis dan analisis data dengan statistik menunjukkan pengaruh positif yang signifikan yaitu koefisien korelasi 0,845 dan koefisien determinasi 71,40 % yang artinya besarnya pengaruh implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan adalah 71,40 sedangkan 28,6 dipengaruhi faktor lain selain kebijakan PUGAR, dan hipotesis terbukti yaitu hasil t hitung $15,558 >$ dari t tabel 1,661.

Kata Kunci: Program PUGAR, implementasi kebijakan *Grindle*, kesejahteraan.

¹ Dosen Tetap Yayasan UNTAG Cirebon, email: erna@untagcirebon.ac.id

² Dosen Tetap Yayasan UNTAG Cirebon, email: ria.adriyani@untagcirebon.ac.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki total luas laut sebesar 3.257.357 km² dengan garis pantai sepanjang 80,79 km. Kabupaten Cirebon berada sepanjang pantai Utara Laut Jawa memiliki potensi usaha tambak garam didukung faktor geografis curah hujan kecil rata-rata 1808,45 mm/thn, suhu rata-rata 30° – 40° C, berada di ketinggian ± 0 – 2 mdpl dan kemiringan lereng antara 0 – 1 % , memiliki jenis tanah alluvial kelabu tua cocok sebagai petakan pembuatan garam dan kadar salinitas yang tinggi mencapai 25 – 28‰. Usaha tambak garam dikerjakan oleh petani berpengalaman bertani garam lebih dari 10 tahun dengan luas lahan 0.5 – 1 ha, mayoritas status lahan sewaan, serta. Produksi garam dihasilkan rata-rata mencapai 35 – 65 ton tetapi dengan kualitas garam nomor dua. Walaupun menjadi daerah penyangga untuk memenuhi kebutuhan nasional, namun ternyata hingga kini produksi garam di beberapa wilayah Indonesia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan garam, sehingga Indonesia terpaksa melakukan impor garam.

Masyarakat pesisir tidak bisa menikmati hasil jerih payah dari produksi garam, keberadaan industri lokal di wilayah Kab Cirebon tidak bersedia menerima hasil produk garam lokal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan industri, padahal pelaku industri pengguna garam sesuai aturan yang telah ditetapkan, harus menyerap produksi lokal. Saat ini industri pengguna garam baru menyerap garam lokal di Madura, sementara di Cirebon baru satu perusahaan yang rutin menyerap garam hasil petani garam lokal. Kendala menghadang industri menyerap garam lokal salah satunya petani lebih tertarik menjual ke tengkulak dengan alasan harga jauh lebih tinggi, karena jika dijual ke industri pengguna garam dibeli dengan harga standar, meskipun penyerapannya berkelanjutan. Belum terserap sepenuhnya garam lokal di tingkat lokal Cirebon atau umumnya Jawa Barat untuk pasokan industri, akibat tidak memenuhi persyaratan, garam yang dibutuhkan industri makanan memiliki spesifikasi tertentu, diantaranya kandungan NaCl 97 % dan air 0,05 %. Kurangnya persyaratan garam lokal untuk dipasok ke industri terindikasi akibat keterbatasan teknologi pengolahan garam. Garam lokal mengandalkan pengeringan dengan matahari masih maka bergantung pada musim, padahal dalam setahun industri membutuhkan sekitar 350.000-400.000 ton garam untuk kegiatan produksi mereka antara lain aneka pangan, makanan, minuman, bahkan di tingkat nasional garam dibutuhkan untuk industri pupuk, pakan ternak dan pengasinan ikan. (JurnalAsia 23 April 2015).

Daerah penghasil garam di Indonesia rata-rata kota atau kabupaten di pesisir pantai. Kabupaten Cirebon adalah wilayah yang memiliki luas lahan produksi garam tertinggi yaitu 8.858 hektar dengan target produksi garam 130 ton per hektar, jadi diharapkan bahwa Kab Cirebon sesuai target akan dapat menghasilkan 501,540 ton. Pada kenyataannya Kab Cirebon hanya dapat memproduksi 1.160 ton saja atau setara 0,23% dari jumlah yang ditargetkan, sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal saja tidak bisa mensuplay untuk kebutuhan nasional. berikut data hasil produksi garam di beberapa wilayah Indonesia.

Tabel. 1
Data Wilayah Penghasil Garam

No	Nama Daerah	Luas Lahan (hektar)	Produksi /tahun (ton)
1	Kab Cirebon	3.858	1.160
2	Sampang Madura	3.064	398,391
3	Indramayu	2.741	352,820 .
4	Pati Jawa Timur	2.838	368,954
5	Sumenep Madura	2.068	268,840
6	Kab Bima Nusa Tenggara Barat (NTB)	1.743	226,593
7	Rembang Jawa Timur	203,924	1.568
8	Pamekasan Madura	929	120,770
9	Kab Jeneponto Sulawesi Selatan	434	47,812
10	Kab Pangkep Sulawesi Selatan	420	46,812

Sumber : Husain Ali; Radarcirebon.com, 2016

Fenomena memprihatinkan ternyata tidak terjadi simbiosis mutualisme antara petani penghasil produksi garam lokal dengan sektor industri yang memanfaatkan garam sebagai bahan baku di daerah. Hadirnya bantuan dana berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kepada para petani garam yang tergabung dalam kelompok petani garam. Menjaring sekitar 6.870 petambak garam di Kabupaten Cirebon tergabung dalam 687 kelompok petani garam setiap kelompok, beranggotakan sekitar 7 - 8 orang petani garam. Sejak tahun 2012 Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah penerima program PUGAR, bantuan diupayakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. (Surat Kabar Kabar Cirebon. 11 Okt 2014)

Efektivitas pelaksanaan program PUGAR menghapus dominasi petani garam tradisional menjadi masyarakat petani garam pesisir yang kreatif. Menciptakan iklim usaha masyarakat pesisir menjadi kreatif dengan pemberdayaan masyarakat, butuh campur tangan pemerintah agar masyarakat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) melalui kebijakan real yang mampu melihat kondisi saat ini masyarakat petani garam sangat kekurangan modal kerja maupun investasi, juga ketiadaan alat pengolahan garam, agar garam yang diproduksi baik sesuai selera pasar, intinya adalah Swasembada Garam Nasional. berdampak terhadap tingkat pendapatan para petani dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011, tentang "Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional", dan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 05/PER-DJKP3K/2014 Tahun 2014 tentang "Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)", pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan lembaga masing-masing. Tindak lanjut kebijakan pemerintah ini adalah dicanangkannya Program

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap masyarakat pesisir pantai.

Berdasarkan observasi Peneliti maka dibutuhkan analisis mengetahui implementasi kebijakan program PUGAR dari pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan kemampuan masyarakat, sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi, bagi masyarakat yang memiliki usahagaram mampu memperoleh penghasilan memadai sehingga kesejahteraan petani garam meningkat. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana dampak implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai Kabupaten Cirebon

Adapun tujuan penelitian dan target luaran yang ingin dicapai ini adalah: Mengetahui dampak Implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai Kab. Cirebon.

Hipotesis penelitian ini “Terdapat hubungan yang positif antara implementasi Kebijakan PUGAR dengan kesejahteraan petani garam di pesisir pantai kab. Cirebon”.

Penelitian Implementasi kebijakan pemerintah PUGAR berkontribusi terhadap kesejahteraan petani garam, agar implementasi kebijakan pemerintah bisa memacu pertumbuhan maupun pengembangan iklim usaha petani garam yang berdampak bagi penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai Kab Cirebon.

Berdasarkan latar belakang penelitian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai kabupaten Cirebon.

II. LITERATUR

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional, baik garam konsumsi maupun garam industri dengan prinsip *bottom-up*.

PUGAR merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu Prioritas Nasional ke-4 tentang Penanggulangan Kemiskinan, oleh sebab itu, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, pelaksanaan kegiatan PUGAR mendapat perhatian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4).

Kegiatan PUGAR 2014 mengacu pada 15 Indikator Output PNPM Nasional sebagaimana Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pada peningkatan kualitas produksi dan produktivitas di tingkat lahan tambak garam (*on farm*) melalui penguatan kapasitas petambak garam rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG), penguatan koperasi,

peningkatan partisipasi, tata kelola, pengarusutamaan gender, dan dukungan Pemerintah Daerah. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan PUGAR 2014, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka dipandang perlu adanya **Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014**.

Kegiatan PUGAR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF), dan/atau teknologi geomembran/isolator, serta Unit Pengolahan Garam (UPG),
2. Meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat;
3. Memperkuat usaha KUGAR dengan memfasilitasi kemitraan/jejaring usaha dan pemasaran garam rakyat;
4. Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan;
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi, dan pengolahan garam rakyat;
6. Menginisiasi, memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi (Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) garam rakyat di tingkat desa

2.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan sebagai tindakan atau program kongkrit dengan aturan dirumuskan dan ditafsirkan berdasarkan tujuan dan sasaran kebijakan. Tahap implementasi kebijakan merupakan aspek penting keseluruhan proses kebijakan, untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau keputusan pengadilan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat secara formal maupun informal, tetapi paling menentukan dan berperan penting adalah pejabat formal yang secara yuridis ditunjuk melaksanakan kebijakan, sedangkan pembuatan kebijakan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penelitian terdahulu Reni Marantika (2014), tujuan dari penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar); Perspektif Governance (Studi Di Kabupaten Sampang) adalah untuk mengetahui efektivitas program PUGAR dalam perspektif *governance* di Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program PUGAR merupakan regulasi yang kurang tepat karena hanya menekankan pada penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat daripada untuk menyelesaikan permasalahan dasar penggarahan yaitu permodalan dan pemasaran. Hal tersebut yang menyebabkan program PUGAR di Kabupaten Sampang belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini.

Nur saulah, Sa songko (2016) Evaluasi Kelayakan Usaha Garam Rakyat Berpola Subsisten Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Pesisir (Studi Pada Kelompok Petani Garam Pugar Kabupaten Pasuruan), usaha garam sangat sensitif terhadap perubahan variabel harga dan hasil produksi, kurang sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan tidak peka terhadap perubahan variabel dana bantuan pemerintah berupa BLM, namun bantuan pemerintah (BLM) tersebut memberikan dampak besar terhadap beberapa kelompok PUGAR. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan kebijakan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya Kabupaten Pasuruan

Ananda Kurniawan, Bagus (2014) Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep),Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)Ratih Setyaningrum (2015) Tingkat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Ditinjau Dari Aspek Produksi, Distribusi, Permintaan Pasar Dan Sosial Budaya : analisis teknis untuk menentukan tingkat pemberdayaan dan strategi pemberdayaan. Hasil yang diperoleh adalah aspek produksi berkaitan dengan teknologi tingkat keberdayaan rendah, aspek distribusi, dan permintaan pasar rendah serta aspek sosbud dan keberlanjutan usaha tinggi. Aksi tindak prioritas jangka pendek adalah optimalisasi teknologi terapan untuk proses produksi, perbaikan rantai distribusi dan informasi pasar yang berkelanjutan sehingga tercipta stabilitas usaha garam rakyat.

Kebijakan merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (goals), tujuan (objectives) dan cara yang diwujudkan dalam program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan berdasarkan Model Grindle berpendekatan *top-down* yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Proses*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai.

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga nampak tingkat perubahan yang terjadi. (Agustino Leo; 2008:154-155)

Pada dasarnya kebijakan atau peraturan masih bersifat abstrak maka untuk tindakan kongkrit perlu diimplementasikan dalam bentuk program artinya sudah masuk dalam teknis pelaksanaan atau operasionalnya. Maka apabila kebijakan diimplementasikan sama artinya dengan implementasi dari program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.

2.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh para pakar pekerjaan sosial maupun PBB dan badan-badan di bawahnya di antaranya :

Friendlander (1982 & Apte, 1982) dalam bukunya Adi Fahrudin (2012:20) mendefinisikan kesejahteraan social sebagai:

A system of laws, programs, benefits, and service which strengthen or assure provisions for meeting social need recognized as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order.

Definisi ini didasarkan atas definisi definisi yang dikemukakan oleh *Elizabeth Wickenden* tahun 1965 yang mengemukakan bahwa “ *social welfare includes those laws, programs, benefits, and services which assure or strengthen provisions for meeting social needs recognized as basic to the well-being of the population and better functioning of the social order*” (dalam Bell, 1983: 2). Kesejahteraan sosial mencakup undang-undang, program-program, manfaat-manfaat, dan pelayanan-pelayanan yang menjamin atau memperkuat perbekalan untuk kebutuhan-kebutuhan social yang diakui sebagai dasar bagi kesejahteraan penduduk dan keberfungsian yang lebih baik dari tata social.

2.3. Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain:

(1.) Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

(2.) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Karena kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan semata-mata.

(3.) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan

pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia

(4.) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

(5.) Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

(6.) Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

(7.) Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Kesejahteraan sosial juga selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup (*quality of life*). Konsep kualitas hidup selalu digunakan untuk mendeskripsikan “kehidupan yang baik” dalam beberapa disiplin ilmu termasuk ekonomi, sosiologi pekerjaan sosial, kedokteran dan keperawatan. Bagaimanapun isi dan pengukuran spesifik mengenai kualitas hidup sangat bervariasi antara disiplin tersebut juga dalam disiplin itu sendiri (Farquhar 1995). Rentang utama dari standar kehidupan ekonomi sampai menerima status kesehatan dalam kedokteran. Dalam kenyataannya lebih dari 1000 pengukuran mengenai berbagai aspek dari kualitas hidup yang diidentifikasi dan lebih dari 100 definisi kualitas hidup yang telah diusulkan (Cummins, 1997).

World Health Organization mendefinisikan *quality of life* atau kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Kualitas hidup dalam hal ini merupakan suatu konsep yang sangat luas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Implementasi kebijakan PUGAR dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Bungin Burhan (2008: 146) penelitian deskriptif merupakan metode atau prosedur pemecahan masalah yang diamati dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tahap implementasi pelaksanaan program PUGAR di Kab. Cirebon dan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Data diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung ketika turun kelapangan dan juga data pendukung diperoleh dari dokumen laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data mengenai implementasi kebijakan PUGAR dalam mensejahterakan masyarakat petani garam menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner.

Lokasi penelitian di desa sepanjang Pesisir Pantai Utara Kabupaten Cirebon yang terdapat tambak garam, Desa Mundu, Citemu, Bandengan, Waruduwur, Pangenan.

Peubah yang diamati/diukur dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) variabel, kedua variabel ini saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi antara Implementasi Kebijakan (program PUGAR) dengan Kesejahteraan Masyarakat. berikut :

Tabel. 2. Operasionalisasi variabel menurut Dimensi dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi program (Grindel)	<i>Content of policy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kepentingan yang mempengaruhi - tipe manfaat - derajat perubahan yang ingin dicapai - letak pengambilan keputusan - pelaksanaan program - sumber-sumber daya yang digunakan
	<i>Context of Policy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kekuasaan, kepentingan, strategi - karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa - tingkat kepatuhan dan respon pelaksana
Kesejahteraan (Friedlander dalam Adi fahrudin)	Undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Peraturan
	Program-program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Penyuluhan 3. Bantuan dana
	Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi meningkat 2. Kualitas meningkat 3. Pendapatan meningkat
	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Administrasi mudah 2. Akses Permodalan mudah 3. Akses pemasaran mudah

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek (populasi) adalah petani garam dipesisir pantai Kabupaten Cirebon berjumlah 6.870 . Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Random sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (e)^2}$$

Dengan e (presisi) 10%,

$$n = \frac{6.870}{1 + 6870 (0.1)^2}$$

$$n = 98,56 = 99$$

3.1. Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis ini meliputi uji instrument data yaitu validitas dan reliabilitas

1. Uji validitas

Setelah dilakukan perhitungan dengan teknik korelasi *product moment* diperoleh koefisien korelasi bulir (r-hitung) untuk 21 bulir pernyataan dengan nsampel 20 orang (n=20), diperoleh nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrument setiap variable, peneliti sajikan dalam tabel 5.11. sebagai berikut:

a. Uji validitas Implementasi Kebijakan

Nilai-nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk mengukur ketepatan 10 pernyataan pada kuesioner sebagai berikut : Hasil korelasi disebut r hitung yang kemudian di bandingkan dengan r tabel(n=20, tingkatkesalahan 5%manilai r tabel 0,444) dengan ketentuan :

$r_{hitung} \leq r_{tabel} (0,444)$ maka r hitung dinyatakan tidak valid

$r_{hitung} \geq r_{tabel} (0,444)$ maka r hitung dinyatakan valid

Dari 10 item pernyataan implementasi kebijakan dinyatakan valid dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$

b. Uji Validitas Kesejahteraan

Nilai-nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk mengukur ketepatan 10 pernyataan pada kuesioner sebagai berikut : Hasil korelasi disebut r hitung yang kemudian di bandingkan dengan r tabel(n=20, tingka tkesalahan 5% mak anilai r tabel 0,444) dengan ketentuan :

$r_{hitung} \leq r_{tabel} (0,444)$ maka r hitung dinyatakan tidak valid

$r_{hitung} \geq r_{tabel} (0,444)$ maka r hitung dinyatakan valid

Dari 11 pernyataan injstrumen kesejahteraan (Y) dinyatakan valid dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program *SPSS 22,0 for windows* diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Alpha Cronbach*) diperoleh hasil sebagai berikut:

nilai koefisien alfa diperoleh sebesar 0,851 artinya bahwa instrumen kebijakan PUGAR adalah reliabel, karena nilai koefisien alfa (0,851) > 0,600.

b. Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program *SPSS 22,0 for windows* diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Alpha Cronbach*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai koefisien alfa diperoleh sebesar 0,816 artinya bahwa instrumen kesejahteraan masyarakat adalah reliabel, Karena nilai koefisien alfa (0,851) > 0,600.

3.2. Analisis Data

Sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka analisis data penelitian digunakan:

Data yang terkumpul dianalisis dengan program *SPSS 22,0 for windows* dan analisis kuantitatif dengan rumus korelasi pearson.

1. Koefisien korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara implementasi kebijakan PUGAR dan pemberdayaan masyarakat petani garam di pesisir pantai kabupaten Cirebon, dengan rumus

$$r = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[(N)(\sum x^2) - (\sum x)^2] [(N)(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi

n = jumlah data

x = implementasi kebijakan

y = pemberdayaan masyarakat

2. Uji Hipotesis

a. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0) : Tidak terdapat dampak Implementasi Kebijakan PUGAR terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Pesisir Kabupaten Cirebon.
2. Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat Dampak Implementasi Kebijakan PUGAR terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Pesisir Kabupaten Cirebon.

b. Nilai Kritis

sebagai pembanding digunakan t tabel pada taraf kekeliruan 5% uji dua pihak dengan $dk = n-2$

c. Nilai Hitung

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variable terdapat hubungan yang erat atau saling berperan, antara variable X (implementasi Ksbijakan dan variable Y (Pemberdayaan Masyarakat) , dilakukan pengujian hipotesis nol di mana:

Ho: $r < 0$, artinya tidak terdapat peranan yang signifikan antara implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat

Ha: $r > 0$, artinya terdapat peranan yang signifikan antara implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat .

Koofesien Korelasi

Untuk menguji hipotesis yang penulis kemukakan, menurut Sugiono (2005:377) menggunakan rumus signifikasi korelasi sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{1-r^2} \text{ dengan } dk = n - 2$$

Di mana:

t = nilai signifikasi atau nilai t hitung

r = koefisien korelasi hasil hitung

n = jumlah obyek yang dianalisis dengan tingkat signifikasi 5% dengan $dk=n-2$ apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka koefisien korelasi dapat diberlakukan pada populasi.

Koefisien Determinasi

Adalah r kuadrat, menggambarkan besarnya dampak variable X terhadap variable Y yang dinyatakan dalam prosentase.

IV. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini variable-variabel yang digunakan adalah variable implementasi kebijakan (X) sebagai variable bebas dan pemberdayaan (Y) sebagai variable terikat. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 99 orang responden kuesioner tersebut dinyatakan valid dan reliable dengan 21 bulir pernyataan. Perhitungan skore yang telah divalidasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu computer dengan program *SPSS for window 22*.

Deskripsi data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3

Tab. 3. Deskripsi Data Hasil Penelitian

		Kebijakan PUGAR (X)	Kesejahteraan (Y)
N	Valid	99	99
	Missing	0	0
Mean		34.4545	37.8182
Std. Error of Mean		.64948	.61911
Median		37.0000	39.0000
Mode		37.00	41.00
Std. Deviation		6.46225	6.16005
Variance		41.761	37.946
Skewness		-1.763	-1.993
Std. Error of Skewness		.243	.243
Kurtosis		3.403	4.727
Std. Error of Kurtosis		.481	.481
Range		34.00	31.00
Minimum		10.00	15.00
Maximum		44.00	46.00
Sum		3411.00	3744.00
Percentiles	10	24.0000	32.0000
	25	32.0000	37.0000
	50	37.0000	39.0000
	75	39.0000	42.0000
90	40.0000	43.0000	

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tidak ada missing data atau semua responden penelitian (99) orang telah mengisi kuesioner dengan baik.

Berikut ini dijelaskan mengenai analisis deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masing- masing variable penelitian baik variable bebas implementasi kebijakan (X) maupun variable terikat kesejahteraan(Y) yang didasarkan pada jawaban responden tentang implementasi kebijakan PUGAR yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

4.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur dengan dimensi *Content of Policy* dan *Context of policy* dimana dimensi tersebut dapat digunakan indicator-indikator kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber-sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan strategi, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan respon pelaksana.

Dari indicator tersebut disusun sebanyak 10 pernyataan yang disebarikan kepada 99 orang responden. Pada masing-masing diberikan alternative jawaban dengan pendekatan skala likert. Untuk mengkualifikasi setiap alternative jawaban pada kuesioner dari pernyataan diberi bobot nilai berjenjang sebagai berikut untuk alternative jawaban setuju (SS) diberi nilai 5, setuju (S) diberi nilai 4, ragu-ragu (R) diberi nilai 3, tidak setuju (TS) diberi nilai 2 dan sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1.

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variable Implementasi kebijakan (X) menunjukkan skore terendah 2 dan tertinggi 5. Dengan diperolehnya skore terendah dan skore tertinggi, maka rentang skornya adalah 3. Data hasil jawaban responden tersebut dianalisis dengan menggunakan *SPSS 22 for windows* menghasilkan sebagai berikut :

- Nilai rata-rata (Mean) sebesar 3,44545
- Nilai Tengah (Median) sebesar 3,7
- Modus (Mode) sebesar 3,7
- Simpangan Baku (standar deviasi) sebesar 0,616005
- Varians sebesar 4,1761,

Tabel. 4 Skala Pembobotan / Nilai Jenjang

Interval Jawaban	Kategori Jawaban	Skor Jawaban
4,24 – 5,00	Sangat baik	5
3,43 – 4,23	Baik	4
2,62 – 3,42	Cukup baik	3
1,81 – 2,61	Kurang baik	2
1,0 – 1,8	Sangat tidak baik	1

Sumber : Sutrisno Hadi, 1986

Untuk menentukan kriteria jawaban menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Jenjang} = \frac{\text{Jumlah Kumulatif}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Referensi : Sutrisno Hadi, 1986. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Tabel.5 Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan

Variabel	Pernyataan	Rata-rata skore	Kriteria
Implementasi Kebijakan PUGAR	1. Kebijakan Pugar didukung pemerintah setempat	3,4242	Cukup baik
	2. kebijakan Pugar member manfaat	3,6465	baik
	3. Program Pugar tepat sasaran	3,7980	baik
	4. Pelaksanaan program Pugar sesuai peraturan	3,7071	baik
	5. Program Pugar telah dilaksanakan oleh pemerintah	3,5455	baik
	6. Program Pugar sesuai dengan sumber daya yang ada	3,4444	baik
	7. Program Pugar mendapat dukungan masyarakat	3,1616	cukup baik
	8. Program Pugar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	3,5051	baik
	9. Pelaksanaan Program Pugar sesuai peraturan		
	10. Masyarakat menerima program Pugar	3,9596	baik
	Jumlah Kumulatif Nilai Jenjang =	3,2626	cukup baik

Variabel implementasi kebijakan dengan dimensi *content of policy* untuk pernyataan kebijakan PUGAR didukung pemerintah setempat rata-rata skore 3,4242 berarti masuk dalam katagor cukup baik Yang berarti kebijakan program PUGAR mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Cirebon walaupun belum sepenuhnya hal ini dapat dilihat pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis untuk melaksanakan program PUGAR walaupun belum secara maksimal.

Implementasi kebijakan dengan *konteks of policy* untuk pernyataan program PUGAR mendapat dukungan masyarakat rata-tara skor 3,1616 berarti masuk katagori cukup baik Yang artinya program PUGAR mendapat dukungan dari msyarakat maupun pemerintah karena dirasakan sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan walaupun belum sepenuhnya dukungan tersebut karena belum semua petani garam mendapatkan program PUGAR tersebut.

4.2. Kesejahteraan Petani Garam

Kesejahteraan petani garam diukur dengan dimensi-dimensi Undang-undang, Program-program, manfaat, dan pelayanan, dimensi-dimensi tersebut dapat digunakan indicator-indikator sebagai berikut kebijakan, peraturan, pelatihan, penyuluhan, bantuan dana, produksi meningkat, kualitas meningkat, pendapatan meningkat, akses administrasi mudah, akses permodalan mudah, akses pemasaran mudah.

Dari indicator-indikator tersebut disusun 11 pernyataan disebarakan kepada 99 orang responden. Pada masing-masing diberikan alternative jawaban dengan pendekatan skala likert. Untuk mengkualifikasi setiap alternative jawaban pada kuesioner dari pernyataan diberi bobot nilai berjenjang sebagai berikut untuk alternative jawaban setuju (SS) diberi nilai 5, setuju (S) diberi nilai 4, ragu-ragu (R) diberi nilai 3, tidak setuju (TS) diberi nilai 2 dan sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1.

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variable Kesejahteraan (Y) menunjukkan skore terendah 1 dan tertinggi 5. Data hasil jawaban responden tersebut dianalisis dengan menggunakan *SPSS 22 for windows* menghasilkan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 37,8182
- b. Nilai Tengah (*Median*) sebesar 39
- c. Modus (*Mode*) sebesar 41
- d. Simpangan Baku (*standar deviasi*) sebesar 6,16005
- e. *Varians* sebesar 37,946

Tabel . 6. SkalaPembobotan / Nilai Jenjang

Interval Jawaban	KatagoriJawaban	SkorJawaban
4,24 – 5,00	Sangat baik	5
3,43 – 4,23	Baik	4
2,62 – 3,42	Cukup baik	3
1,81 – 2,61	Kurang baik	2
1,0 – 1,8	Sangat tidak baik	1

Sumber :Sutrisno Hadi, 1986

Untuk menentukan kriteria jawaban menggunakan rumus :

$$\text{NilaiJenjang} = \frac{\text{Jumlah Kumulatif}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Tabel. 7 Hasil Penelitian Kesejahteraan

Variabel	Pernyataan	Rata-rata skor	Criteria
Kesejahteraan	1. Program PUGAR merupakan kebijakan pemerintah	3,8283	Baik
	2. Program PUGAR didukung oleh peraturan	3,4646	Baik
	3. penyuluhan/sosialisasi dilakukan secara rutin	3,5051	Baik
	4. Pelatihan teknis program PUGAR dilaksanakan secara rutin	3,4242	Cukup baik
	5. Program PUGAR memberikan bantuan dana	3,3535	Cukup baik
	6. Program PUGAR meningkatkan produksi garam	3,6364	Baik
	7. Program PUGAR meningkatkan kualitas garam	3,5051	Baik
	8. Program PUGAR meningkatkan pendapatan petani garam	3,5556	Baik
	9. Akses pengurusan program PUGAR mudah	3,5051	Baik
	10. Pengurusan bantuan modal dapat diakses dengan mudah	3,3939	Cukup baik
	11. Program PUGAR memudahkan pemasaran hasil produksi	2,6465	Baik

Variabel kesejahteraan dengan dimensi Undang-undang untuk pernyataan program PUGAR merupakan kebijakan pemerintah rata-rata skor 3,8283 berarti masuk dalam katagori baik yang berarti kebijakan program PUGAR telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Cirebon berdasarkan perraturan yang berlaku..

Untuk dimensi program-program untuk pernyataan program penyuluhan/sosialisasi melalui program PUGAR diberikan kepada petani secara rutin rata-rata skore 3,5051 berarti masuk pada kategori baik yang berarti program PUGAR sudah disosialisasikan dan diadakan penyuluhan kepada petani garam secara rutin oleh instansi terkait dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Cirebon secara rutin kepada petani garam di wilayah pesisir utara kabupaten Cirebon.

Untuk dimensi manfaat untuk pernyataan program PUGAR dapat meningkatkan produksi garam rata-rata skore 3,6364 berarti masuk pada kategori baik yang artinya dengan adanya program PUGAR yang diberikan kepada petani garam telah menerima manfaat diantaranya dapat meningkatkan produksi garam baik secara kuantitas maupun kualitas kepada petani garam di kabupaten Cirebon.

Untuk dimensi pelayanan untuk pernyataan akses pengurusan administrasi program PUGAR mudah rata-rata skore 3,5051 berarti masuk dalam kategori baik yang artinya petani garam untuk mendapatkan program PUGAR tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasinya hanya saja karena jumlah anggaran terbatas maka tidak semua petani garam dapat menerima program PUGAR.

4.3. Dampak Implementasi Kebijakan PUGAR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Pantai Utara Kabupaten Cirebon

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat petani garam yang menerima program PUGAR sebanyak 99 responden dengan memberikan kuesioner untuk dijawab terkait dengan variabel bebas implementasi kebijakan PUGAR terhadap Kesejahteraan petani garam dengan jumlah pernyataan 21 butir soal.

Setelah memperoleh data dihitung analisis koefisien korelasi regresi dan uji hipotesis dengan computer menggunakan program *SPSS 22,0 for windows*.

4.3.1. Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara implementasi kebijakan PUGAR dengan kesejahteraan masyarakat petani garam di wilayah pantai utara Kabupaten Cirebon.

Tabel. 8. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.714	.711	3.31187

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan PUGAR (X)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel X (implementasi Kebijakan PUGAR) dan variabel Y (kesejahteraan) adalah 0,845 yang terletak diantara 0,80 sampai 1,000 yaitu daerah korelasi sangat kuat. Berarti dapat di tarik bahwa kesimpulan implementasi kebijakan PUGAR memiliki hubungan / pengaruh / dampak yang sangat kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,714 atau 71,40%. Hal ini persentase pengaruh variabel implementasi kebijakan PUGAR (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 71,40%. Sedangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 28,60%.

4.3.2.Uji Hipotesis dan Analisis Regresi

Untuk menguji hipotesis menggunakan computer dengan program SPSS 22,0 for window Dan hasilnya sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.068	1.814		5.549	.000
	Kebijakan PUGAR (X)	.805	.052	.845	15.558	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan (Y)

Dari tabel tersebut diatas, untuk menguji hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 15,558 atau nilai Sign 0,000 sedangkan pada t tabel pada df (n-2) = 97 adalah sebesar 1,661; artinya bahwa $t_{hitung} (15,558) > t_{tabel} (1,661)$ atau Sign (0,000) < 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh/dampak yang signifikan antara implementasi kebijakan PUGAR dengan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian hipotesis terbukti.

Sedangkan untuk menentukan hasil persamaan regresi, dapat diperoleh hasil persamaan regresi sederhana yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,805 + 10,068X$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a = 0,805 adalah konstanta yang artinya, apabila kebijakan PUGAR dianggap nol maka kesejahteraan masyarakat sebesar 53,676.

b = 10,068 koefisien variabel kebijakan PUGAR (X) yang artinya, jika kebijakan PUGAR meningkat sebesar 1, maka kesejahteraan masyarakat akan naik sebesar 10,068; dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

yang positif kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu apabila kebijakan PUGAR semakin diterapkan dan ditingkatkan, maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis implementasi kebijakan program PUGAR di wilayah pesisir pantai kabupaten Cirebon telah dilaksanakan dengan baik. Dari dimensi *content of policy* dan *konteks of policy*, rata-rata hasil jawaban responden adalah bernilai baik, ini dibuktikan dari hasil analisis jawaban responden rata-rata skor adalah 3,44545 yang masuk pada kategori baik dan hasil analisis kesejahteraan petani garam dipesisir pantai kabupaten Cirebon telah dilaksanakan dengan baik dari dimensi undang-undang, program-program, manfaat, pelayanan rata-rata hasil jawaban responden bernilai baik ini dibuktikan dengan hasil analisis jawaban responden rata-rata skor adalah 3,78182 yang masuk pada kategori baik.

Dari hasil penelitian dengan analisis statistik menggunakan program SPSS 22,0 for windows implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang positif sangat kuat terhadap kesejahteraan petani garam dipantai kabupaten Cirebon. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil nilai koefisien korelasi antara variable X (implementasi kebijakan PUGAR) dan variable Y (kesejahteraan petani garam) yaitu 0,845. Dan besarnya pengaruh/dampak implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir kabupaten Cirebon dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar sebesar 0,714 atau 71,40 % yang artinya implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam sebesar 71,40 % sedangkan variable lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan petani garam sebesar 28,60%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis merekomendasikan untuk pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam membuat kebijakan adalah Implementasi kebijakan PUGAR perlu disosialisasikan lebih baik lagi dengan menekankan manfaat dari program PUGAR sehingga akan mendapat dukungan dari seluruh petan dan pemberian program PUGAR agar diberikan kepada petani garam lebih merata baik secara teknis maupun bentuk dana, dan transparan mana yang menjadi hak dan kewajiban sehingga petani garam dapat merasakan manfaat program PUGAR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

- Ananda Kurniawan, Bagus, Jurnal Sosial dan Humaniora WACANA, Vol 17, No 3 (2014) Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep)
- Nur saulah, Sa songko jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya vol 1 no 1 th 2016 Evaluasi Kelayakan Usaha Garam Rakyat Berpola Subsisten Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Pesisir (Studi Pada Kelompok Petani Garam Pugar Kabupaten Pasuruan)

- *Ratih Setyaningrum* J@TI UNDIP : Jurnal Teknik Industri <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/issue/view/1429> Volume 10, No 1, Januari 2015 Tingkat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Ditinjau Dari Aspek Produksi, Distribusi, Permintaan Pasar Dan Sosial Budaya
- *Reni Marantika*; Jurnal elektronik mahasiswa jurusan administrasi publik <http://administrasipublik.studentjurnal.ub.ac.id/vol2no9thn2014> Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar); Perspektif Governance (Studi Di Kabupaten Sampang)

Sumber Buku:

- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung :Refika Aditama
- Arikunto, Suharsami. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali Faried, 2012 *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Garna, Yudistira 2007 *Penelitian dalam Ilmu Pemerintah, desain penelitian*, Bandung :Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation
- Islamy, Irfan. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nitisusastro, Mulyadi 2009. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung Alfabeta
- Parsons Wayne, 2005 *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta :Kencana
- Satria, Arif , 2015 *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta diterbitkan atas kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Surachmad, Winarno, 2000. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung :AIPI
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru

Sumber Regulasi:

- Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 05/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014.
- Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, pelaksanaan kegiatan PUGAR